

PARLIAMENTARY MEETING ON THE OCCASION OF THE
UNITED NATIONS CLIMATE CHANGE CONFERENCE
Marrakesh (Morocco), 13 November 2016

Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) mengirimkan delegasi mengikuti Parliamentary Meeting on the Occasion of the UN Climate Change Conference yang dihelat di Marrakesh, Maroko pada 13 November 2016. Sesi parlemen ini merupakan salah satu sesi dalam pertemuan dunia terkait perubahan iklim (COP 22).

Ketua BKSAP Dr. Nurhayati Ali Assegaf menyampaikan intervensi di sesi *Climate Change Negotiations Post-Paris: New Era, New Opportunities*. Dr. Nurhayati mengatakan bahwa *technical and financial assistance* yang terkait perubahan iklim tidak dapat dipisahkan dari pembangunan berkelanjutan. “harus ada pemikiran komprehensif antara keduanya,” ujarnya.

Dalam forum tersebut, Dr. Nurhayati Ali Assegaf meminta PBB untuk memberi perhatian lebih besar kepada negara-negara berkembang karena masalah Climate Change di negara berkembang termasuk Indonesia dalam keadaan yang sangat mengkhawatirkan. Ia merujuk pada kondisi geografis Indonesia yang terletak di jalur rawan bencana dan rawan perubahan iklim ekstrem.

Dalam konteks di atas, Dr. Nurhayati Ali Assegaf memahami bahwa mitigasi akan menghabiskan dana yang besar. Akan tetapi, ia berpandangan bahwa adaptasi akan menjadi lebih penting untuk negara-negara berkembang terutama negara-negara yang rawan terdampak perubahan iklim seperti Indonesia.

Menanggapi pernyataan Ketua BKSAP, pihak the UN Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) menyampaikan apresiasi atas langkah nyata yang telah dilakukan Indonesia seperti program reboisasi atau penghutanan kembali, *reservoir*, dan energi terbarukan. Dalam pada itu, UNFCCC meminta Indonesia untuk memberikan proposal program seperti *redd+* untuk memperbaiki program dalam menghadapi kerusakan yang diakibatkan oleh perubahan iklim. Pihak UNFCCC memberi prioritas pada program energi hijau yang mendapatkan bantuan USD 10 juta. Program tersebut dihelat dalam rangka menggarap program energi terbarukan.

Ketua BKSAP juga menyampaikan komitmen Indonesia mengatasi perubahan iklim. Komitmen tersebut ditunjukkan DPR RI dengan menyetujui pengambilan keputusan atas Rancangan Undang-Undang Pengesahan Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Kerja PBB mengenai Perubahan Iklim (Paris Agreement to the United Nations Frame Works on Climate Change) menjadi Undang-Undang. Lebih lanjut Dr. Nurhayati Ali Assegaf yang juga Ketua Panitia Kerja SDGs BKSAP ini mengatakan: “ratifikasi Paris Agreement menunjukkan komitmen nasional dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang rendah emisi.” (BKSAP)